



Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Analysis of Factors Affecting the Formulation of Performance-Based Regional Budgets for the Government of Aceh Singkil District

Faisal Ismid¹, Heri Kusmanto² & MaksumSyahri Lubis³

¹Magister Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area

²Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis Kinerja di Kabupaten Aceh Singkil. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 orang dari 46 SKPD yang merupakan jumlah seluruh kepala dan Ka.sub.Bag Program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkup kabupaten Aceh Singkil, Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda dengan variabel tak bebasnya adalah penyusunan anggaran berbasis kinerja (Y) dan variabel bebasnya adalah : Komitmen organisasi (X₁), penyempurnaan sistem (X₂) , sumber daya yang cukup (X₃) , reward (X₄), dan punishment (X₅) Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa secara kesuruhan (simultan) Variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis Kinerja di Kabupaten Aceh Singkil. Secara parsial variabel komitmen dari komponen organisasi berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis Kinerja di Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan variabel lainnya penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis Kinerja di Kabupaten Aceh Singkil.

Kata Kunci: Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem, Sumber Daya, Reward, Punishment.

Abstract

The problem in this study is whether the commitment of all organizational components, improving the administration system, sufficient resources, rewards and sanctions have a simultaneous and partial effect on the preparation of Performance-based Regional Revenue and Expenditure Budget in Aceh Singkil Regency. Respondents in this study were 92 people from 46 SKPD who were the sum of all heads and sub-districts of Sub-Province of the Regional Work Unit (SKPD) program in the Aceh Singkil district. This study was a quantitative research with multiple regression analysis with non-dependent variables. performance-based budget (Y) and the independent variables are: Organizational commitment (X1), system improvement (X2), sufficient resources (X3), reward (X4), and punishment (X5) From the results of the study, it can be explained that overall (simultaneous) commitment variables from all organizational components, improving the administration system, sufficient resources, awards and sanctions have an effect on the preparation of Performance-based Regional Revenue and Expenditure Budget in Aceh Singkil Regency. Partially the commitment variable from the organizational component has a negative effect and does not significantly influence the preparation of Performance-based Regional Revenue and Expenditure Budget in Aceh Singkil Regency, while other variables that improve the administration system, sufficient resources, rewards and sanctions have a positive and significant effect on the preparation of the Budget Regional Income and Expenditures based on Performance in Aceh Singkil District.

Keywords: organizational commitment, system improvement, resources, reward, punishment.

How to Cite: Ismid, F., Kusmanto, H., & Lubis, M.S. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(2) 2020: 129-140*

*E-mail: dilla@gmail.com



PENDAHULUAN

Adanya tuntutan *good corporate governance* dan reformasi pengelolaan sektor publik yang disertai munculnya teori tentang *New Public Management* (NPM) yang dilandasi tiga prinsip yang berlaku secara universal yaitu profesional, transparansi, dan akuntabilitas telah mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan keuangan baik itu dari proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Menyadari akan kebutuhan pelaksanaan pemerintahan yang mengarah pada tuntutan diatas maka pemerintah kemudian merivisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Perubahan yang perlu dilakukan pemerintah yakni mengubah sistem pendekatan anggaran tradisional menjadi pendekatan baru yang dikenal sebagai anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Masih banyaknya pemerintahan daerah yang masih menggunakan sistem anggaran tradisional menjadi suatu permasalahan yang harus dianggap serius guna untuk mencapai tuntutan reformasi pengelolaan keuangan sektor publik. (Kadir, 2018; Siregar, et al., 2017; Ramadayani, et al., 2018; Nugraha, & Sulastri, 2018). Anggaran tradisional yang sering digunakan oleh pemerintah daerah didominasi dengan penyusunan anggaran lebih bersifat *Line-Item* dan *Incrementism* yakni dalam proses penyusunan anggarannya tersebut hanya didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perubahan yang mendasar pada tahun anggaran baru. Pusat perhatian dari anggaran berbasis kinerja ini diarahkan pada upaya pencapaian hasil, sehingga menghubungkan hasil alokasi sumber daya atau pengeluaran dana secara eksplisit dengan hasil yang ingin dicapai.

Konsekuensi logis dari penerapan kedua pendekatan ini adalah terjadinya *overfinancing* atau *underfinancing* pada suatu unit kerja, yang pada akhirnya tidak mencerminkan pada pelayanan publik yang sesungguhnya dan cenderung terjadi pemborosan. Penerapan sistem ini sudah mengakar di kalangan birokrasi pemerintahan daerah sehingga dalam penerapan sistem penganggaran dengan *performance budgeting* harus dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati (Zubir, 2012; Winaya, & Yudartha, 2018; Sitompul, & Anggreini, 2013).

Kegagalan informasi anggaran sering disebabkan karena adanya pemahaman yang tidak cukup oleh pelaksana anggaran dan syarat-syarat reformasi yang harus dipenuhi dalam proses anggaran Achyani & Cahya (2011). Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu : BPKP (2005): 1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi; 2) Fokus penyempurnaan sistem administrasi secara terus menerus; 3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang); 4) Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas; 5) Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Masalah penganggaran di daerah terjadi karena ketidak konsistenan dengan berbagai produk perencanaan yang telah disiapkan. Tidak jarang penganggaran berbenturan dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Beberapa contoh yang lebih

spesifik antara lain adalah keterpaduan perencanaan dan penganggaran. Peraturan-peraturan diatas, tidak disebutkan secara tegas bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai wilayah perencanaan tidak boleh menyebutkan total anggaran. Namun rencana tanpa anggaran, maka input dan output program/kegiatan yang bersangkutan tidak diketahui, Aeni (2009).

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja tetapi belum maksimal. Berdasarkan laporan realisasi anggaran 4 tahun terakhir (2015-2018) pos belanja tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu surplus anggaran rata-rata diatas Empat Puluh Milyar, hal ini mencerminkan bahwa penentu besarnya anggaran belum sepenuhnya mengacu pada target berupa *output* dan *outcome*, seperti pengelolaan sumber dana *otsus* dan dana alokasi khusus (*DAK*) yang terbentur dengan kaedah dan peraturan yang berlaku.

Pada saat ini, melihat gambaran kenyataan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil mengenai penerapan anggaran kinerja dirasakan belum optimal. Fenomena di atas terjadi akibat penyusunan anggaran yang masih belum mematuhi kaidah-kaidah yang telah diterapkan. Pada beberapa sisi, khususnya program dan kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD, masih sangat dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula dengan penentu besarnya anggaran belum sepenuhnya mengacu pada target berupa *output* dan *outcome*.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada SKPD Lingkup Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari 46 SKPD dimana waktu penelitian dilaksanakan selama 3 Bulan dari Januari 2019 sampai dengan Maret 2019. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kausal (causal), Umar (2008) menyebutkan “desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung “. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) dan hukuman /sanksi (punishment) sebagai variabel independen terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja di Kabupaten Aceh Singkil sebagai dependen variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang berjumlah 46 (empat puluh enam) unit, dengan jumlah responden sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang yang terdiri dari masing – masing Kepala SKPD dan Kasubbag Penyusunan Program untuk 46 SKPD. Jenis penelitian ini adalah sensus, menurut Erlina dan Mulyani (2007) “jika peneliti menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian maka disebut sensus, sensus digunakan jika elemen populasi relatif sedikit dan bersifat heterogen”. Sehingga seluruh populasi, yaitu Kepala SKPD dan Kepala Sub Bidang Perencanaan yang secara struktural bertanggungjawab dan terlibat dalam penyusunan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjumlah 92

(Sembilan puluh dua) orang dijadikan sampel. Metode yang digunakan adalah metode survey, seperti yang disebutkan Ikhsan dan Ghozali (2006) bahwa “metode survey merupakan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli”. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil salah satunya adalah bidang anggaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (1999) dalam Sembiring (2009), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini yang akan diberikan kuesioner adalah seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Sub Bidang Perencanaan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) orang. Tahapan dalam penyebaran dan pengumpulan kuesioner dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama adalah melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh Kepala SKPD dan Kepala Sub Bidang Perencanaan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian menunggu pengisian kuesioner tersebut. Tahap yang kedua adalah pengambilan kuesioner yang telah diisi oleh Kepala SKPD dan Kepala Sub Bidang Perencanaan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk dilakukan pengolahan data. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda (Multiple Linear Regression Analysis). Menurut Sugiyanto (2004) “analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen”. Untuk keabsahan hasil analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan software SPSS.

Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = APBD Berbasis Kinerja

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄, b₅ = Koefisien regresi

X₁ = Komitmen dari seluruh komponen organisasi

X₂ = Penyempurnaan sistem administrasi

X₃ = Sumber daya yang cukup

X₄ = Penghargaan (reward) yang jelas

X₅ = Hukuman sanksi (punishment) yang tegas

E = Error term

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi. Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi cukup sering dalam mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model yang dimasukkan ke dalam serangkaian data. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji statistik untuk pengujian hipotesis. Priyatno (2008) dalam Sembiring (2009) menyebutkan “uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan)”. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Jika

terdapat deviasi antara sampel yang ditentukan dengan jumlah populasi maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan antara menolak maupun menerima suatu hipotesis. Untuk menguji hipotesis mengenai faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward), dan sanksi (punishment) secara simultan dan parsial, berpengaruh signifikan terhadap terhadap APBD berbasis kinerja, digunakan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t. Priyatno (2008) menyebutkan "Uji simultan dengan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen". Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05 maka hasil uji F dapat dihitung dengan bantuan program SPSS pada tabel ANOVA. Hasil uji F menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, jika p-value (pada kolom sig.) lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan (sebesar 5 %). Priyatno (2008) menyebutkan "uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen". Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05 maka hasil uji t dapat dihitung dengan bantuan program SPSS dapat dilihat pada tabel t hitung (*tabel Coefficients*). Nilai dari uji t hitung dapat dilihat dari p-value (pada kolom Sig.) pada masing-masing variabel independen, jika p-value lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan atau t hitung (pada kolom t) lebih besar dari t tabel (dihitung dari two-tailed $\alpha = 5\%$ $df = n - k - 1$, k merupakan jumlah variabel independen), maka nilai variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (dalam arti H_a diterima dan H_o ditolak, dengan kata lain, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen). Rumus yang digunakan untuk uji statistik thitung:

$$t_{hitung} = b_i / s_{b_i}, i=1,2,\dots,p$$

dimana:

b = koefisien regresi

Sb = kesalahan baku koefisien regresi

Menurut Nugroho (2005) dalam Benar Baik Sembiring (2009) "koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen". Dengan bantuan olahan program SPSS koefisien determinasi (R^2) terletak pada tabel model Summary dan tertulis R Square. Namun menurut Nugroho (2005) menyebutkan "...untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan R Square yang sudah disesuaikan atau tertulis Adjusted R Square karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai R Square dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai R Square berkisar antara 0 sampai dengan 1".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No.14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2002'-2027'30" Lintang Utara dan 97004'-97045'00" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara

berbatasan dengan KotaSubulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia,sebelah Timur berbatasan dengan Pripinsi Sumatra Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Dengan luas daerah 1.857,88 Km² membagi Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 120 Desa Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah yakni daratan dankepulauan. Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten dari 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, yang berada di ujung selatan Provinsi Aceh di Pulau Sumatera ,yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Selatan, dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang Undang No.14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2002'-2027'30" Lintang Utara dan 97004'-97045'00" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia,sebelah Timur berbatasan dengan Pripinsi Sumatra Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Dengan luas daerah 2.187 Km² membagi Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 Kecamatan, 19 Mukim, dan 116 Desa. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Singkil Utara mempunyai luas wilayah terluas yaitu 441 km² atau 20,16 persen dari luas wilayah kabupaten. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Danau Paris 338 km² atau 15,45 pesen. Sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya secara berurutan yaitu Singkil, Simpang Kanan, Gunung Meriah, Suro, Pulau Banyak, Kuala Baru, Kota Baharu, dan Singkohor mempunyai luas wilayah masing masing dari keseluruhan luas wilayah Aceh Singkil. (www.acehsingkilkab.go.id tgl, 30 Agt 2016, 09:0 Setelah dilakukan uji asumsi klasik, selanjutnya pengujian yang dilakukan adalah pengujian hipotesis penelitian yang meliputi, koefisien determinasi, uji f dan uji t. hasil dari pengujian tersebut digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen (Ritonga & Lubis, 2015). Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel komitmen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, kualitas sumber daya manusia dan reward terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Peneliti melakukan pengujian koefisien korelasi atau R dan pengujian koefisien determinasi atau R Square (R). Untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi dan determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 ^a	0.731	0.270	0.26592

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Penghargaan, Penyempurnaan Sistem, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Yang Cukup

Berdasarkan tabel 4, nilai R adalah 0,859 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi yang (kuat) atau berpengaruh karena berada pada interval 0,60 - 0,799. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, kualitas sumber daya manusia reward

dan Punishment berpengaruh kuat atau berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas {independent} dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,731 hal ini berarti bahwa 73,1% penyusunan anggaran berbasis kinerja dapat dipengaruhi oleh variasi variabel independen dan sisanya sebesar 26,9% (100% - 73,1%) dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Uji f dilakukan untuk menguji apakah variabel komitmen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), kualitas sumber daya manusia (X3) , reward (X4) dan Punishment (X5) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja (Y).

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
¹ Regression	2.629	5	0.526	7.435	.000 ^b
Residual	5.798	82	0.071		
Total	8.427	87			

a. Dependent Variable: APBD Berbasis Kinerja

b. Predictors: (Constant), Sanksi, Penghargaan, Penyempurnaan Sistem, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Yang Cukup

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil F hitung sebesar 7,345 dimana F tabel dengan sampel sebanyak 88 responden adalah 2.325 sehingga hipotesa diterima (Fhitung > Ftabel , 7,435 > 2,325) dengan tingkat signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya secara simultan, komitmen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, kualitas sumber daya manusia reward dan Punishment berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja terbukti dan diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan komitmen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, kualitas sumber daya manusia reward dan punishment akan mampu meningkatkan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel komitmen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), kualitas sumber daya manusia (X3) reward(X4) dan Punishment (X5) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja (Y). Nilai t hitung dapat dilihat pada tabel 4.6.3 sebagai berikut:

Tabel 4.6.3 Hasil Uji T

Variabel	t hitung	t tabel	Sig	Keputusan
Komitmen Organisasi	-2.36	1.98	0.021	Hipotesis Ditolak
Penyempurnaan Sistem Administrasi	2.07	1.98	0.014	Hipotesis Diterima
Kualitas Sumber Daya Manusia	2.974	1.98	0.004	Hipotesis Diterima
Reward	1.99	1.98	0.039	Hipotesis Diterima
Punishment	2.8	1.98	0.043	Hipotesis Diterima

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa variable Komitmen organisasi (X1) berpengaruh negatif terhadap variable dependen penyusunan anggaran berbasis kinerja dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis ditolak yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi (X1) terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja, sedangkan variabel independen penyempurnaan sistem administrasi (X2), Sumber daya manusia yang cukup (X3), Reward (X4) dan Punishment (X5) berpengaruh positif dan signifikan pengaruhnya terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja

Persamaan Regresinya adalah :

$$Y = 2,321 - 0,186 X_1 + 0,083X_2 + 0,362X_3 + 0,068X_4 + 0,117X_5 + e$$

Y : Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

X₁ : Komitmen Organisasi

X₂ : Penyempurnaan Sistem Administrasi

X₃ : Kualitas Sumber Daya Manusia

X₄ : Reward

X₅ : Punishment

a : Konstanta

Penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat dibuat pembahasan sebagai berikut: Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh komitmen organisasi terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah negatif dan tidak signifikan. Ini berarti komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Pradana (2014) yang menemukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Cahyadi (2010) menemukan bahwa adanya pengaruh interaksi antara komitmen organisasi dengan partisipasi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa diduga komitmen organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja ditolak.

Walaupun seseorang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi, akan tetapi adanya tekanan dari atasan atau karena struktur organisasi yang memaksa untuk berpartisipasi sehingga hanya akan dianggap sebagai tugas serta persaingan kerja yang menjadikan seseorang sulit mengekspresikan rasa kecintaannya terhadap organisasi. Setiap komponen komitmen organisasi berkembang sebagai hasil dari pengalaman yang berbeda serta memiliki

implikasi yang berbeda pula pada setiap individu. Komitmen karyawan pada organisasi dapat dipengaruhi tingkat kepuasannya terhadap pekerjaan, dimana semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin tinggi kepuasan kerja karyawan.

Adanya komitmen organisasi tidak selamanya menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam lingkup pemerintah. Kemungkinan hal ini disebabkan karena tidak semua anggota organisasi terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Hanya individu tertentu atau jabatan tertentu yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran sehingga ada indikasi untuk memasukkan unsur-unsur pribadi

bahkan unsur-unsur politik didalamnya. Misalnya dalam merealisasikan dana bantuan sosial yang menguntungkan suatu pihak untuk sebuah pencitraan.

Tipologi komitmen organisai menjelaskan bahwa komitmen dalam konsep ini menekankan pada sumbangan seseorang yang sewaktu-waktu dapat hilang jika orang itu meninggalkan organisasi. Tindakan meninggalkan organisasi menjadi suatu berisiko tinggi karena orang merasa takut akan kehilangan sumbangan yang mereka tanamkan pada organisasi itu dan menyadari bahwa mereka tidak mungkin mencari gantinya.

Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan. Ini berarti penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Sembiring (2009) menemukan bahwa penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan diduga penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh dan signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja diterima.

Penyempurnaan sistem dalam hal ini yang dimaksud adalah target kinerja, pengukuran kinerja, analisis kinerja, standar pelayanan minimal dan standar biaya. Indikator inilah yang dijadikan sebagai alat pengukuran implementasi anggaran berbasis kinerja. Jika penyempurnaan sistem administrasi baik/tinggi akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja yang baik/tinggi, demikian sebaliknya jika penyempurnaan sistem administrasi buruk/rendah maka penyusunan anggaran berbasis kinerja akan buruk/rendah (Deliana & Nasution, 2016).

Hal ini sesuai dengan konsep administrasi yaitu reformasi administrasi perlu ditujukan pada penyempurnaan sistem administrasi untuk pembangunan daerah. Penyempurnaan sistem administrasi secara berkelanjutan berupa penyiapan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja secara terus menerus melalui penyempurnaan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja yang sudah ada yaitu standar pelayanan minimal, standar analisis belanja, target kinerja dan standar biaya merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 100 ayat (2) dan (3).

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan. Ini berarti kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Syafira (2013) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan diduga kualitas sumber daya manusia berpengaruh dan signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja diterima.

Organisasi kerja diharapkan telah melakukan pengembangan keterampilan serta kemampuan mental personel untuk mendukung personel dalam pemecahan masalah ketika mengambil keputusan terkait penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, seluruh personel hendaknya memiliki latar belakang pendidikan, bakat, potensi, serta kepribadian

dan motif bekerja yang sesuai dengan bidang pekerjaan terkait penganggaran berbasis kinerja.

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik dimana indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : sumber daya manusia, sumber daya anggaran, informasi berupa data dan fasilitas pendukung lainnya. Sumber daya adalah faktor rasional yang mengukur sejauh mana organisasi memiliki sumber daya yang relevan untuk efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja. Apa bila terdapat sumber daya yaitu staff dan dana yaang khusus untuk mengembangkan dan mengevaluasi kinerja maka akan berdampak pada pengadopsian ukuran kinerja.

Pengaruh Reward Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan hasil Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa reward berpengaruh positif dan signifikan. Ini berarti reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yandra (2013) yang menemukan bahwa reward berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa diduga reward berpengaruh dan signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja diterima.

Suatu reward dalam bentuk material atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawan bertujuan agar memotivasi mereka bekerja lebih keras dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi. Sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja, pemberian penghargaan (reward) memegang peranan penting. Seringkali dalam penerapannya, sistem anggaran berbasis kinerja tidak tepat waktu atau kurang berhasil diterapkan (Harahap & Angelia, 2016) .

Adanya reward bagi organisasi (SKPD) yang konsisten dan berhasil menerapkan sistem anggaran ini, maka akan memacu organisasi tersebut untuk berbuat lebih baik lagi bagi organisasinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa reward adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk memberikan apresiasi kepada individu atau organisasi yang telah berhasil melakukan pekerjaan dengan baik dan berprestasi, sehingga akan dapat memberikan motivasi positif buat individu atau organisasi untuk kembali mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik.

Pengaruh Punishment Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pengaruh punishment terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja adalah positif dan signifikan (Rafiqah & Nasution, 2015). Pengaruh positif menunjukkan bahwa penerapan sanksi (punishment) adalah penting dalam keberhasilan penyusunan APBD berbasis kinerja. Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Skinner (1983) dalam Wahyuningsih (2009) yang mengungkapkan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh rangkaian penguatan dan hukuman (punishment) yang diterimanya dari lingkungan. Demikian pula menurut Subagyo (2006) dalam Wahyuningsih (2009), sosialisasi pemberlakuan peraturan-peraturan pokok organisasi kepada anggota organisasi belumlah cukup walaupun dilakukan secara terus menerus jika tidak disertai adanya mekanisme pemberian sanksi yang tegas dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penerapan sanksi yang tegas atas keterlambatan penyampaian laporan akuntabilitas

kinerja dan ketidakberhasilan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja dapat menjadi motivasi bagi SKPD untuk mewujudkan APBD berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelapotan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Pasal 34.

SIMPULAN

Secara keseluruhan (Simultan) variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis Kinerja di Kabupaten Aceh Singkil, dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,435 > 2,325$) dengan signifikasnsi nya lebih kecil dari 0,05 Secara parsial variabel penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis Kinerja di Kabupaten Aceh Singkil Sedangkan variabel komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap penyusunan APBD Berbasis Kinerja

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP, (2000), Pengukuran Kinerja: Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah, Jakarta
- BPKP, (2005), Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi), Jakarta.
- Deliana & Nasution, I. (2016). Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Medan Denai Kota Medan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (2): 152-161
- Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan R.I, (2008), Modul Pengelolaan Keuangan Negara, Jakarta
- Erlina dan Mulyani, S, (2007), Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, hal. 53, USUpress, Medan
- Harahap, A.S. & Angelia, N. (2016). Peranan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 29-42.
- Ikhsan, A., dan Ghozali, I, (2006), Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen, PT. MadjtiMedan Cipta, Medan.
- Indriantoro dan Supomo, (1999), Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta.
- Kadir, A. (2018). Analisis Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagai Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 9-15.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, (2006), Manajemen Yang Berorientasi Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta
- Nugraha, D.S. & Sulastri, L (2018). Pengaruh Faktor Kompetensi Perencana, Faktor Data, Serta Faktor Anggaran terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Admnistration Journal (Public Administration Journal)*. 8 (2): 172-177
- Pradana, B.A., Handayani, B.D., & Murtini, H. (2014). "Determinasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Pada Universitas Negeri Malang)". *Accounting Analysis Journal* 3 (1).
- Rafiqah, M.O., & Nasution, I. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Mengajar Guru Sma Yayasan Perguruan Swasta Kesatria Medan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (2): 126-132
- Ramayani, R. Nasution, I. Matondang, A. (2018). Analisis Kontribusi Sektor Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah, *PERSPEKTIF*, 7 (2): 50-54
- Ritonga, A.H., & Lubis, A.A. (2015). Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Herfinta Farm & Plant Kantor Cabang Medan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (2): 112-125
- Sembiring, B.B, (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja di pemerintahan kabupaten karo, Pascasarjana: USU

- Siregar, A.H. Nasution, M.H.T. & Nasution, I. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas. *PERSPEKTIF*, 6 (2): 83-87
- Sitompul, M dan Anggreini A.L., (2013), Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan, *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA) UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 1-10.
- Sugiyanto, (2004), Analisis Statistika Sosial, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur
- Sugiyono, (1999), Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, (2008), Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D, Edisi Revisi, Cetakan ke 16, Alfabeta, Bandung.
- Syafira, M.F., Ludigdo, U & Djahuri, A. (2013). "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Reward Dan Punishment Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empirik Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat". *Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 5 No 2* pp: 157-171.
- Wahyuningsih. (2009). *Public Administration Community Reward and Punishment*. Jakarta
- Winaya, I.K. & Yudarta, I.P.D. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (1): 1-13
- Zubir, (2012), Prospek Kewenangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi di Kabupaten Aceh Tamiang), *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 1 (1): 92-107
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2003. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta: Kemetrian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58, 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8, 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20, 2004, tentang Rencana Keija Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65, 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59, 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79, 2007, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.